

PENGARUH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN DANA ALOKASI UMUM BELANJA DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2012-2017

Kaleb Yosep Yupukolo *
Teguh Erawati

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: eradimensiarc@gmail.com

leks030395@gmail.com*

ABSTRACT

Keywords

This study aims to determine the Effect of Regional Taxes, Regional Retributions, Separate Regional Wealth Management, and General Allocation Funds for Regional Expenditures. This type of research is quantitative research. The sampling technique in this research is the purposive sampling method. The data taken is the target and Realization of Regional Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, Results of Management of separated regional wealth and General Allocation Funds for Regional Expenditures from 2012-2017. The data analysis technique uses multiple regression tests which are preceded by descriptive statistics, classic assumption tests, namely normality test, autorrelation test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The results of the study show that Regional Taxes, Regional Levies, Separate Regional Wealth Management, and General Allocation Funds have a simultaneous effect on Regional Expenditures. Partially regional taxes and regional retribution do not affect regional spending.

regional tax, regional retribution, Separate Regional Wealth Management, General Allocation Funds, Regional Expenditures.

PENDAHULUAN

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.9 tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengelola hasil pendapatan asli daerahnya sendiri dapat mempengaruhi perkembangan keuangan daerah, serta akan berakibatnya tanggung segalanya aktivitas dan rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat secara bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut dengan hal pendapatan asli daerah (Pratomo, 2016). Permasalahan pengalokasian DAU sering timbul, karena terdapat perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Tetapi bagi daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Permasalahan yang lainnya, ketika pemerintah daerah meminta DAU sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pengalokasian anggaran, merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh Pemerintah Daerah di dalam organisasi sektor publik. Pendapatan daerah yang tinggi, yaitu Pajak Daerah, retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan DAU harus diimbangi dengan tingginya Belanja Daerah. Namun di dalam praktiknya, masih belum terlaksana dengan baik dalam pengalokasian belanja daerah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Agency Theory menyatakan bahwa konflik antara *principal* dan *agent* disebabkan adanya perbedaan informasi antara *principal* dan *agent*. Diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abdullah, 2006). Penelitian Lane (2000) dalam Prabowo, dkk (2014) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah mempengaruhi belanja daerah. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2009), Handayani dan Elva (2012) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar (Subowo, 2014). Menurut hasil penelitian Afrianty (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat)” dengan hasil penelitian yaitu pajak daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah. Menurut penelitian dari Devi Eryza Rosianan dan Handayani Nur (2017) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah” pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2013 dimana hasil menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2015) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus tahun 2004- 2013” dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah. Menurut penelitian Afrianty (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat)” Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap belanja daerah. Menurut penelitian Permatasari (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta 2004-2013” dari hasil menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**Pengaruh Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Daerah**

Menurut (Abdul Halim, 2004 hal 68 dalam Pratomo,2016) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut penelitian Pratomo (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan lain-lain Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul” dari hasil menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat oleh peneliti yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan berpengaruh terhadap belanja daerah di kabupaten bantul, ini bisa saja disebabkan oleh belum maksimalnya pemerintah kabupaten Bantul dalam memanfaatkan pendapatan daerah dari sektor ini. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah**

Menurut Undang-Unadang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut penelitian Permatasari (2016) dengan judul “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi D.I yogyakarta tahun 20004-20013” dari hasil menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, dilihat dari hasil t-hitung $1,052 < t\text{-tabel } 1,67866$. Dari hasil penelitian atau uji F bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Karena nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel yaitu $12,885 > 2,81$ dengan nilai signifikansi 0,000. Menurut penelitian Sarwono (2014) dengan judul “ Pengaruh Pajak Daerah, retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya yang Sah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia tahun Anggaran 2010-2011” dari hasil menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah

H4: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**METODOLOGI PENELITIAN****Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah tahun 2012-2017 yang ada di dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2013; 68).

Definisi Operasional**Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran

dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sistem yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih menyadarkan peran masyarakat dalam membayar pemungutan pajak secara efisien sehingga dapat menarik masyarakat untuk datang membayar pajak. di Prov. DIY tahun 2012-2017.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah digunakan yaitu perhitungannya berdasarkan perhitungan dari Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Alat ukur yang digunakan yaitu perhitungannya berdasarkan perhitungan dari dari Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Alokasi UMUM

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alat ukur yang digunakan yaitu perhitungannya berdasarkan perhitungan dari dari Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis regresi linier berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat *BLUE* (*Bes Linear Unbiased Estimator*).

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011;160). Uji normalitas akan terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu *Kolmogorov-Smirnov test*. Jika nilai signifikan dari pengujian *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011;164).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011;105). Deteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolonieritas jika besar nilai VIF ≥ 10 dan nilai *tolerance* $\leq 0,10$ (Ghozali, 2011;106).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau homokedastisitas (Ghozali, 2011;139). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ atau 0.05 (Ghozali, 2011;143).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Dalam uji autokorelasi menguji menggunakan Statistik Q: *Box-Piece* dan *Ljung Box* yang digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2 (*by default* SPSS menguji sampai lag 17). Kreteria ada tidaknya autokorelasi adalah jika jumlah lag yang signifikan lebih dari 2 maka dikatakan terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika lag yang signifikan lebih dari 2 atau < 2 maka tidak terkena autokorelasi. Hasil uji *Ljung Box* konsisten dengan uji *Durbin watson* (Ghozali, 2011;118).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z*. Residual berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (5%). Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh data bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,578. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel antara variabel independen. Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance lebih besar 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil 10. bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *variance inflation vactor* (VIF) dibawah 10. Nilai tolerance untuk variabel jumlah Pajak Daerah sebesar 0,160 Retribusi Daerah sebesar 0,391 Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,212 dan dana alokasi umum 0,604. Nilai VIF untuk jumlah pajak daerah 6,233, variabel Retribusi daerah 2,561 variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4,724 dan variabel dana alokasi umum 1,655. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonieritas.

Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahn pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Tidak terjadi autokorelasi jika $DU < DW < 4 - DU$. Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi dari data tersebut diketahui nilai DW sebesar 2,178 nilai ini kita bandingkan dengan nilai tabel signifiakansi 5% jumlah sampelnya $N=30$ dan jumlah variabel independen $4 (K=4) = 4$. 30 maka diperoleh DU sebesar 1,739. Nilai DW sebesar 2,178 lebih besar dari batas DU yakni sebesar 1,739 dan kuarang dari $(4 - DU) 4 - 1,739 = 2,261$ sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi ($2,216 > 2,178$) maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk meguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini menggunakan uji *glejser* dimana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji

heteroskedastisitas diatas tidak terdapat heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari semua variabel independen maupun dependen memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan model regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua varabel independen yang dimasukkan dalam metode mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Bahwa nilai F hitung hasil output dari program SPSS sebesar 71,108 dan signifikan pada 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh strategi bisnis, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa nilai *adjusted R square* 0,906 atau 90,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 4 variabel independen penelitian ini mempengaruhi sebesar 90,6% terhadap belanja daerah dan sisanya 9,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah diluar variabel penelitian

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara kedua variabel. Tabel 4.8 menunjukkan hasil dari uji parsial sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.710	1.642			.433	.669
LN_PD	.022	.033	.093		.653	.520
LN_RD	.045	.052	.080		.879	.388
LN_PENG	.250	.068	.451		3.654	.001
LN_DAU	.740	.100	.539		7.374	.000

a. Dependent Variable: LN_BD

Hasil dari analisis tabel 4.8 menunjukan bahwa variabel independen yang pertama yaitu pajak daerah memiliki t hitung 0,653 < t tabel 1,706 dan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,520 maka dapat di simpulkan Hipotesis pertama pajak daerah terhadap belanja daerah tidak terdukung. Hal ini berarti pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah. Variabel independen yang kedua yaitu Retribusi daerah diperoleh nilai t hitung 0,879 < t tabel 1,706 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,388. Maka dapat disimpulkan

Hepotesis 2 Retribusi Daerah tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Variabel independen ketiga yaitu pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di peroleh nilai t hitung $3,654 > t$ tabel $1,706$ dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,001$. Maka dapat di simpulkan Hepotesis 3 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdukung. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel independen keempat yaitu Dana Alokasi Umum di peroleh t hitung $7,374 > t$ tabel $1,706$ dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,000$. Maka dapat di simpulkan Hepotesis 4 terdukung. Hal ini berarti dana alokasi umum terdukung berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja daerah.

PEMBAHASAN

Pernyataan hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,653 < 1,706$) dan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ yaitu sebesar $0,520$. Hasil ini dapat disebabkan oleh kurangnya efisiensi sistem pemungutan pajak, kurangnya pemungutan dari sektor-sektor pajak lain maupun kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2015) yang menyatakan Pajak daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus. Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahab (2016) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Besaran Pajak daerah bukanlah salah satu ukuran yang mampu menurun Belanja Daerah. Hasil ini tidak mendukung penelitian Sarwono (2014) yang menyatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,879 < 1,706$) dan nilai signifikan lebih besar dari $0,05$ yaitu $0,388$ sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan retribusi daerah rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahab (2016) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2003 hingga 2012. Hasil ini tidak mendukung penelitian Sarwono (2014) yang menyatakan Retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus.

Pernyataan hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($0,654 > 1,706$) dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,001$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD, semakin banyaknya penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan akan meningkatkan PAD. Semakin tinggi PAD maka akan meningkatkan belanja daerah.

Pernyataan hipotesis kedua menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini dibuktikan dari hasil t hitung lebih besar dari t tabel ($7,374 > 1,706$) dan nilai signifikan lebih kecil dari $0,05$ yaitu $0,000$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula belanja daerah. dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya

untuk membiayai Belanja Daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Gani dan Kristanto (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap besarnya Belanja Daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Laksono dan Subowo (2014) yang menyatakan kabupaten/kota yang mendapatkan DAU besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar.

Pernyataan hipotesis kelima menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum terhadap Belanja daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil variabel dependen yaitu variabel Belanja daerah membuktikan bahwa secara simultan keempat variabel independen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian statistik uji F dengan nilai signifikansi 0,000, nilai ini sama dengan 0,000, F_{tabel} yaitu 2,76 dan F_{hitung} sebesar 71,108 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti secara simultan seluruh variabel independen pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah. Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah hal ini di dukung dengan penelitian Wahab (2016) secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi. Afrianty (2014) Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kab/kota di Provinsi Jawa Barat. Dengan pengaruh yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel pajak daerah dan retribusi daerah dengan belanja daerah dalam penelitian ini dapat digeneralisasikan/diberlakukan umum pada anggota populasi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dana alokasi umum Secara bersama-sama/Simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Karena nilai F-statistic sebesar 0,000

REFERENSI

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Republik Indonesia, 2005, Undang-undang Nomor 58 Pengelolaan Keuangan Daerah

- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 16 tentang Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, 2000, Undang-undang Nomor 34 Tentang Pajak Daerah
- Wahab, Abdul. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Lain-Lain Prendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi*. Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pasarnya Universitas Jambi
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Salemba Empat. Jakarta.
- Permatasari, Indah Putri. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi D.I Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
- Pratomo, Linggau Agus Yulius. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Pajak Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah DI Kabupaten Bantul*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Sarwono, Edy. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah, Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia. Tahun 2010-2011*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
- Afrianty, Fitria. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat)*. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
- Laksono Bagus Bowo dan Subowo. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
- Syafrudin, Ahmad. 2015 *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kudus*. Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang
- Devi Eryza Rosianan dan Handayani Nur . 2017. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi Offset: Yogyakarta Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gani Wiliam dan Kristanto Septiana Bayu. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Kusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Palau Sumatera*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana
- Ferdian, Yuriko. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

